

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. KARO



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

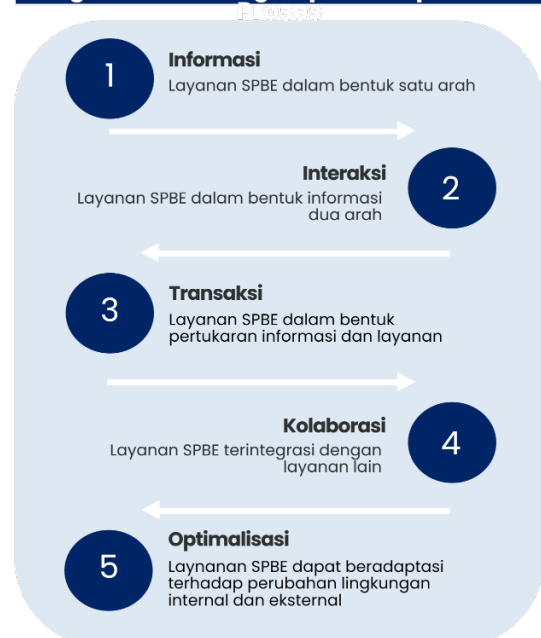
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi

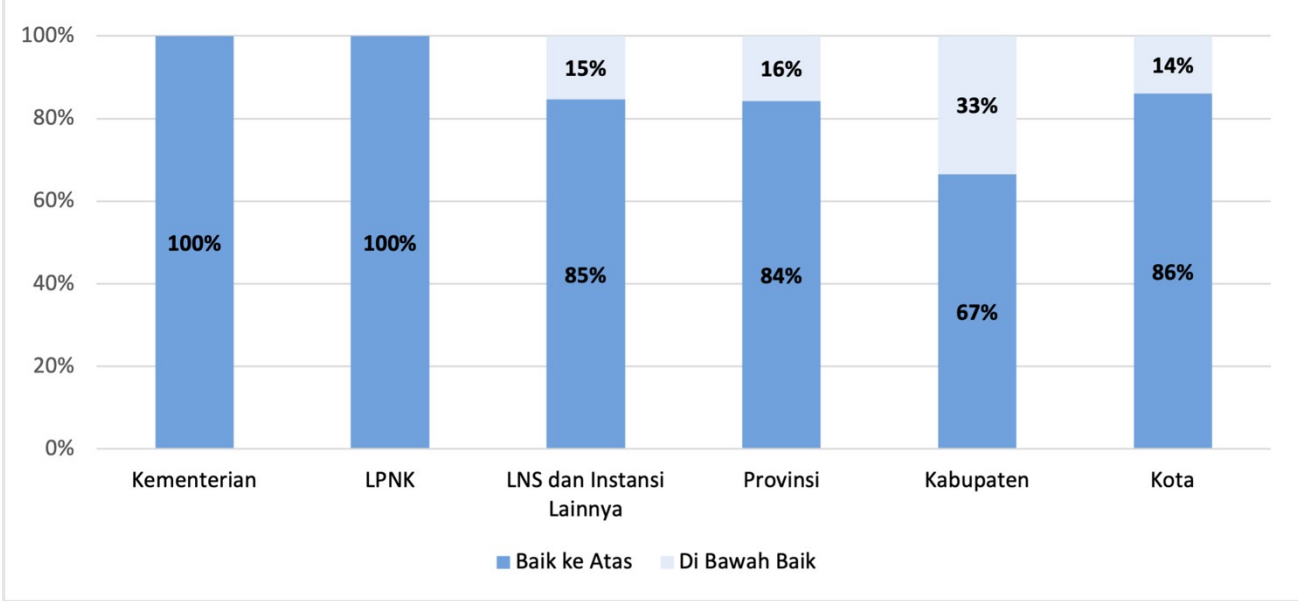


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

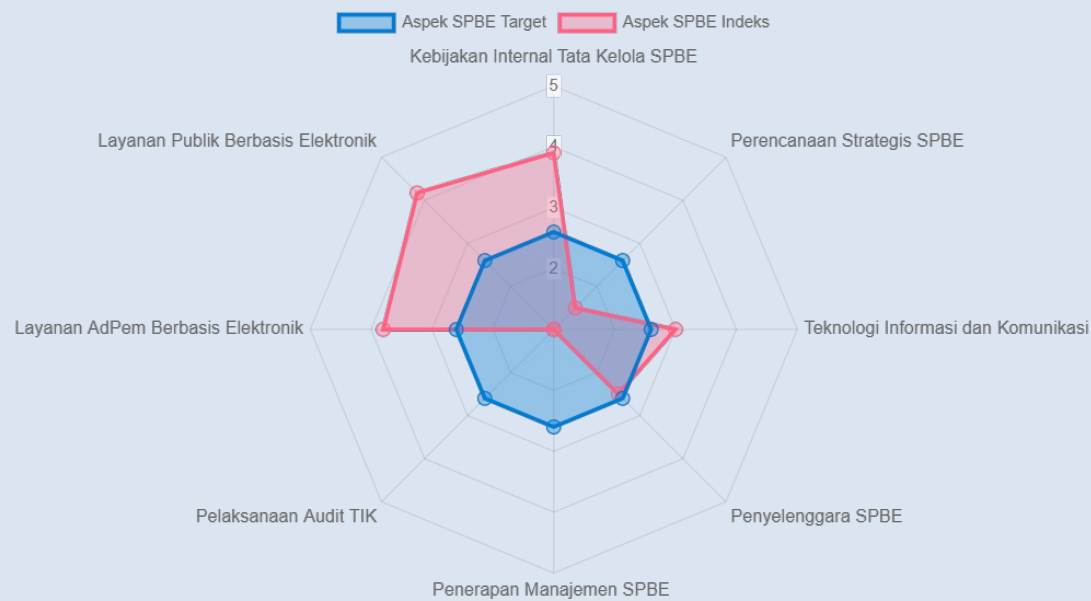
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,04
Domain Kebijakan SPBE	3,90
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,90
Domain Tata Kelola SPBE	2,30
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,95
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,17

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang telah dipenuhi oleh Kabupaten Karo adalah dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Kebijakan Manajemen Data, Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Layanan Pusat Data, Kebijakan Layanan Jaringan IPPD, Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Audit TIK, dan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini dapat dilihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Layanan Jaringan IPPD, Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Audit TIK, dan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Karo. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan IPPD, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD, Manajemen Keamanan Informasi, dan Audit TIK. Keputusan Bupati No 491/580/KOMINFO/2024 juga sebagai dasar hukum dalam pengaturan tugas dari Tim Koordinasi SPBE.
- **Kelemahan**
Disisi lain, Kabupaten Karo tidak mempunyai kelemahan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang telah dipenuhi oleh Kabupaten Karo adalah dengan adanya tata kelola Arsitektur SPBE.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE belum ditemukan adanya indikator yang dapat dijadikan kekuatan oleh Kabupaten Karo.
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Kabupaten Karo masih belum memiliki dokumen terkait Peta Rencana SPBE, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE serta Inovasi Proses Bisnis, dimana tidak ditemukan bukti dukung yang diberikan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dipenuhi oleh Kabupaten Karo adalah dengan adanya dokumen yang mengatur tata kelola Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat terlihat adanya dokumen tata kelola Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Karo. SOP yang dilampirkan pada bukti dukung menguraikan pemeliharaan server. Selain itu, terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa jaringan intra IPPD telah terhubung pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Kabupaten Karo masih belum melaksanakan tata kelola Pembangunan Aplikasi SPBE, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dimana bukti dukung yang diberikan masih menunjukkan penggunaan tata kelola pembangunan aplikasi SPBE dan sistem penghubung layanan baru digunakan oleh sebagian unit kerja.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang telah dipenuhi oleh Kabupaten Karo adalah dengan adanya Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- **Kekuatan**

Pada Aspek Penyelenggara SPBE belum ditemukan adanya indikator yang dapat dijadikan kekuatan oleh Kabupaten Karo.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Karo masih belum melaksanakan seluruh tugasnya, dimana bukti dukung yang diberikan menunjukkan adanya tim koordinasi melalui bukti dukung SK dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan beluma ada penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang telah dipenuhi oleh Kabupaten Karo.

- Kekuatan

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum ditemukan adanya indikator yang dapat dijadikan kekuatan oleh Kabupaten Karo.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Kabupaten Karo masih belum melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan belum ada penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang telah dipenuhi oleh Kabupaten Karo.

- Kekuatan

Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK belum ditemukan adanya indikator yang dapat dijadikan kekuatan oleh Kabupaten Karo.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Kabupaten Karo masih belum melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau bukti dukung baru berupa SK.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh Kabupaten Karo adalah dengan adanya penggunaan layanan administrasi berupa Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi berupa Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dan Layanan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Karo. Penggunaan berbagai aplikasi umum berbagi pakai seperti SIPD, SPSE, dan SRIKANDI mendukung optimalisasi penggunaan layanan administrasi. Terdapat pula layanan SIMBADA yang juga dapat mendukung optimalisasi penggunaan layanan Pengelolaan Barang.

- Kelemahan

Disisi lain, Kabupaten Karo tidak mempunyai kelemahan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh Kabupaten Karo adalah dengan adanya penggunaan layanan publik berupa Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik dapat terlihat adanya penggunaan layanan publik berupa Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Karo.

Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai seperti SP4N-Lapor, JDIH Kabupaten Karo yang telah terintegrasi dengan JDIH Pusat menjadi bukti dukung yang kuat. Selain itu adanya layanan KATASADA yang telah terintegrasi dengan portal satu data Indonesia. Terdapat pula aplikasi SIMRS yang telah terintegrasi dengan Vclaim BPJS. Terdapat pula aplikasi SICANTIK yang mendukung reformasi birokrasi dalam hal memberikan kemudahan berinvestasi.

- Kelemahan

Disisi lain, Kabupaten Karo tidak mempunyai kelemahan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Kabupaten Karo. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Karo, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Karo adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini dapat dilihat dari adanya kebijakan yang telah mengatur tentang Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan IPPD, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE beserta unsurnya secara lengkap. Proses reviu pun telah dilakukan. Begitu pula pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kearsipan sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Terdapat pula beberapa aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh Kabupaten Karo yang telah terintegrasi dengan layanan pusat seperti JDIH. Selain terintegrasi dengan layanan pusat, terdapat pula aplikasi yang terintegrasi dengan layanan lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Karo.

Namun disisi lain, Kabupaten Karo masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK. Pemerintah Kabupaten Karo belum menerapkan seluruh manajemen SPBE dan juga audit TIK.

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah berada pada level yang cukup baik hanya saja masih perlu dilakukan tindak lanjut dari proses reviu yang telah dilakukan. Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Kabupaten Karo perlu membuat peta rencana SPBE Kabupaten Karo. Hal tersebut tentunya sangat berguna dalam mengontrol pelaksanaan SPBE. Peta Rencana SPBE juga tentunya sangat berpengaruh pada Aspek Manajemen SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK. Seluruh Tim Koordinasi juga perlu terus mengontrol tugas dan pelaksanaan tugasnya agar semua dapat terdokumentasi secara lengkap, sehingga penilaian evaluasi SPBE tahun selanjutnya menjadi lebih baik.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4

18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4

38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024